

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada tahun 2005, Komite Standar Akuntansi Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan acuan dalam menyusun laporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Pada Tahun 2010, Komite Standar Akuntansi Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mana menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis *Cash Toward Accrual* atau kas menuju akrual. Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menunjukkan Indonesia telah memasuki era baru terkait pengembangan akuntansi pemerintah yang berubah dari kas menjadi akuntansi berbasis akrual.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan CALK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA terdiri dari Pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan keuangan memiliki manfaat yaitu membuat asset pribadi dengan perusahaan tidak bercampur, menjadi acuan pengambilan keputusan, memberikan informasi, mengetahui keuntungan serta menjadi alat publikasi (Herawati, 2019).

Saat ini dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019. Semenjak munculnya pandemi ini menimbulkan banyak sekali dampak pada kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak yang sangat terasa yaitu kegiatan perekonomian. Pemerintah harus bekerja keras agar memulihkan keadaan perekonomian seperti sebelum Pandemi Covid-19 dengan membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan baru. Menurut artikel dari Kompaspedia, Kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah juga berdampak akan pengelolaan keuangan negara. Untuk mewujudkan Laporan Keuangan negara yang baik maka dibutuhkan Standar Akuntansi Pemerintah.

Dengan munculnya pandemi Covid-19 maka terdapat perubahan pada APBN untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. APBN yang sudah disusun kemungkinan dianggap tidak relevan dengan munculnya pandemi Covid-19. Hal ini dapat terlihat salah satu kebijakan yang dikeluarkan Menteri Keuangan ialah proses revisi dipa 2020 untuk *refocusing*/realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19. Karena hal tersebut, Postur APBN mengalami perubahan yang dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19 di mana memfokuskan pada belanja Kesehatan, jaringan penanganan sosial, dan pemulihan perekonomian.

Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Pada Laporan Realisasi Anggaran pendapatan pemerintah pusat tahun anggaran 2020, realisasi pendapatan negara tahun 2020 sebesar Rp147.783.342.188.990,00 mengalami penurunan -15,96% jika dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1.960.633.583.585.990,00. Selain Pendapatan, selama Pandemi Covid-19 muncul akun khusus Covid-19 yang khusus mencatat belanja terkait penanganan Covid-19.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara struktural bekerja di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, tapi bertanggung jawab kepada kantor wilayah. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.

Munculnya Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya perubahan pada Laporan Realisasi Anggaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui perubahan apa saja yang muncul karena adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Akuntansi Anggaran dan Realisasi Anggaran hingga Aspek Penyajian dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar pada Masa Pandemi Covid-19”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Anggaran dan Realisasinya pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar pada masa pandemic Covid-19?
2. Apa saja perubahan yang terjadi dalam Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar?
4. Bagaimana perubahan besaran Anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar tahun 2020 dengan Anggaran Tahun 2019 sebelum adanya Pandemi Covid-19?
5. Bagaimana Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2019 dan 2020?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penerapan akuntansi anggaran dan realisasinya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar pada masa pandemi Covid-19.
2. mengetahui apa saja perubahan yang terjadi dalam Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar pada masa pandemi Covid-19;
3. mengetahui bagaimana penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar;
4. mengetahui bagaimana perubahan besaran anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara Pematangsiantar tahun 2020 dengan anggaran tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19.
5. mengetahui bagaimana penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar tahun 2019 dan 2020.

### **1.4. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan yang akan penulis bahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 milik Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar, meliputi penyajian dan pengungkapan serta membandingkan LRA tahun 2019 dan 2020. Hal ini dilakukan untuk melihat perubahan apa saja

yang terjadi pada LRA setelah adanya pandemi Covid-19. Penelitian akan dilakukan sekitar bulan Januari hingga Juni 2022.

### **1.5. Manfaat Penulisan**

Dengan dibuatnya Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis berharap agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Diharapkan dengan adanya karya ini dapat menambah wawasan terkait Akuntansi Pemerintah serta Laporan Realisasi Anggaran, juga dapat mengetahui seberapa besar dampak Pandemi Covid-19 terhadap Anggaran.

### **1.6. Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I LATAR BELAKANG**

Pada bab ini penulis membahas terkait penjelasan tentang latar belakang dibuatnya Karya tulis, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan karya tulis, serta sistematika penulisan Karya tulis.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis menjelaskan teori dan penjelasan ataupun penerapan terkait Akuntansi Pemerintah, Laporan realisasi Anggaran dan akuntansi anggaran. Hal ini mencakup Pengertian dari Laporan Realisasi Anggaran, pengertian terkait akuntansi dan pengertian anggaran. Selain itu, bab ini juga menjelaskan secara rinci terkait Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ini. Penulis juga menjelaskan terkait objek yang penulis bahas yang meliputi profil KPPN Pematangsiantar Visi dan misi, tugas dan fungsi serta Struktur organisasi di KPPN Pematangsiantar. Selain itu, bab ini juga membahas terkait penyajian Laporan Realisasi Anggaran KPPN Pematangsiantar TA 2019 dan TA 2020. Serta terdapat pembahasan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap Laporan Realisasi Anggaran KPPN Pematangsiantar dengan membandingkan Laporan Realisasi Anggaran KPPN PematangSiantar TA 2019 dengan LRA KPPN Pematangsiantar TA 2020.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari karya tulis tugas akhir. Pada bab ini meliputi kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis susun dan bahas di bab sebelumnya. Penulis berharap kesimpulan dapat mempermudah pihak-pihak terkait memahami isi dari karya tulis tugas akhir.